



**LAPORAN KINERJA TW II
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10
B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10
BAB IV PENUTUP	21



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2023 ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan data monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan anggaran.

Masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2023 pada waktu yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2023 ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

B. Tugas dan Fungsi

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai ketentuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Makassar menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. Memantau, mengawas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
7. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
9. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
10. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
11. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Makassar Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN



Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP Triwulan II tahun 2023, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, permasalahan dan isu strategis serta sistematika penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin dirai instansi pada Triwulan II tahun 2023 serta kaitannya dengan capaian visi dan misi kepala daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan realisasi dari kinerja serta rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pada setiap kegiatan

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta pemecahan masalah



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi Sekretariat DPRD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2023.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran kinerja, indikator kinerja utama, target kinerja dan program serta anggaran yang disediakan.

Berikut merupakan tabel Perjanjian Kerja yang dibuat berjenjang pada Sekretariat DPRD Kota Makassar :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	72%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 126.038.938.000
2.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp. 64.326.837.000
TOTAL		Rp. 190.365.775.000

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
2.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Kota Makassar	100%
		Tersusun dan terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	100%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 370.204.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.415.600.846
3.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 35.866.555.800
4.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 175.283.000
	TOTAL	Rp. 48.827.643.646



NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 7.747.238.000
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 606.300.000
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.908.000.000
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 1.639.100.000



5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 7.500.000
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 9.600.000
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 144.600.000
TOTAL		Rp. 12.062.338.000

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
	Layanan Administrasi DPRD	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
2.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%



	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 37.930.515.000
2.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 15.219.000.000
3.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 39.846.140.000
4.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 274.500.000
5.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 11.342.176.000
6.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp. 314.400.000
	TOTAL	Rp. 104.926.731.000

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%



Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%
Layanan Administrasi DPRD	Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 385.700.000
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.846.781.980
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 986.102.000
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.595.818.800
5.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 897.985.938
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.533.618.360
7.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 8.869.927.976
	TOTAL	Rp. 24.115.935.054



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi pada Triwulan II Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 yaitu, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) program dalam mendukung Penyelenggaraan Urusan pada Bidang Sekretariat DPRD Kota Makassar :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Target Rp. 126.038.938.000 realisasi Rp. 50.055.153.037 atau 39.71% dari yang direncanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target Rp. 370.204.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 46.900.000 atau sekitar 12.66%;
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan target Rp. 12.415.600.846 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 4.530.078.112 atau sekitar 36.48%;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target Rp. 38.289.215.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 15.264.709.966 atau sekitar 39.86%;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target Rp. 3.994.909.280 dan yang ter-realisis Rp. 841.771.267 atau sekitar 21.07%;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 986.102.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 98.000.000 atau sekitar 9.93%;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 4.533.618.360 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 1.990.985.791 atau sekitar 43.91%;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 4.595.818.800 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 680.686.772 atau sekitar 14.81%;
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan target Rp. 36.764.541.738 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 19.636.311.756 atau sekitar 53.41%;
9. Layanan Administrasi DPRD dengan target Rp. 24.088.927.976 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 6.965.709.373 atau sekitar 28.91%.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target Rp. 64.326.837.000 realisasi Rp. 12.961.135.280 atau 20.14% dari yang direncanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :



1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan target Rp. 7.747.238.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 1.408.163.779 atau sekitar 18.17%;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan target Rp. 606.300.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 0 atau sekitar 0%;
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target Rp. 2.395.283.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 135.620.000 atau sekitar 5.66%;
4. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target Rp. 12.981.276.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 1.916.835.000 atau sekitar 14.76%;
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target Rp. 39.853.640.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 9.366.276.501 atau sekitar 23.50%;
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target Rp. 9.600.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 140.000 atau sekitar 1.45%;
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan target Rp. 314.400.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 108.000.000 atau sekitar 34.35%;
8. Fasilitasi Tugas DPRD dengan target Rp. 419.100.000 dan yang ter-realisis sampai triwulan II Rp. 26.100.000 atau sekitar 6.22%.

Dari 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan sampai triwulan II tahun 2023 belum ada yang memenuhi target yang direncanakan. Untuk capaian target pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota menyentuh angka 39.71% dengan kegiatan yang tertinggi untuk capaian target ialah pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan angka 53.41% serta kegiatan yang terendah untuk capaian target ialah pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan angka 9.93%. Sedangkan untuk capaian target pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menyentuh angka 20.14% dengan kegiatan yang tertinggi untuk capaian target ialah pada kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan angka 34.35% serta kegiatan yang terendah untuk capaian target ialah pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan angka 0%.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pada program / kegiatan adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Makassar dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dari agenda pimpinan dan anggota DPRD serta alat kelengkapan.
- b. Terhambatnya pembuatan dokumen seperti belanja barang dan jasa dari bagian-bagian lain di Sekretariat DPRD.



c. Dan dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Makassar tentu terdapat beberapa kendala, namun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memecahkan persoalan yaitu :

- a. Menghimbau kepada PPTK/Kabag lebih memperhatikan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Memberikan kebijakan kepada para pelaksana tugas untuk segera melakukan percepatan pencairan dana pada setiap belanja barang dan jasa.
- c. Melakukan komunikasi kepada pimpinan dan anggota DPRD bilamana terdapat kegiatan yang mendesak untuk diadakan rapat gabungan.



SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023
Per Tanggal 20 Juli 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 / Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
					5		6		7		8	9	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100									
4.2		Sekretariat DPRD								Rp. 190.365.775.000						Rp. 63.016.288.317		33,10										
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90	90	90	90	65,87	65,87	131,74	146,37	90%															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100	Rp. 121.345.841.228	100	Rp. 125.519.274.889	100	Rp. 126.038.938.000	Rp. 126.038.938.000	54,55	Rp. 20.638.168.326	50,00	29.416.984.711	104,55	50.055.153.037	104,55	16,37	100%	Rp. 175.574.427.926							
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90		90	90	16,67	40,00	56,67	62,96	90%															
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERINTEGRASINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	7	1.073.987.000	7	294.993.500	100	Rp 370.204.000	Rp 370.204.000	0	0	4	46.900.000	4	46.900.000	4	0,00									
				Dokumen																								
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	119.719.000	2	43.087.000	2	Rp 40.570.000	Rp 40.570.000	0	0	1	3.600.000	1	3.600.000	50	0,00									
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12.520.000	1	8.600.000	1	Rp. 15.125.000	Rp 15.125.000	0	0	1	3.600.000	1	3.600.000	100	0,00									
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.018.000	1	12.138.000	1	Rp 15.979.000	Rp 15.979.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	11.390.000	1	9.680.000	1	Rp 20.120.000	Rp 20.120.000	0	0	1	6.060.000	1	6.060.000	100	0,00									
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.490.000	1	9.040.000	1	Rp 16.750.000	Rp 16.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	905.850.000	1	212.448.500	6	Rp 261.660.000	Rp 261.660.000	0	0	1	33.640.000	1	33.640.000	16,66666667	0,00									



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar triwulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan Langkah yang baik dalam memnuhi harapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada triwulan II tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Makassar melaksanakan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas). Dari keseluruhan total program, terdapat 5 (enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang/pendukung. Besaran anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Makassar yaitu Rp. 126.038.938.000 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan angka realisasi 39.71% sedangkan Rp. 64.326.837.000 pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan angka realisasi 20.14%.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar Triwulan II tahun 2023 ini disajikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Makassar, 07 Agustus 2023

SEKRETARIS DPRD,

H. DAHYAL, S.Sos., M.Si
Pangkat. Pembina Tk. I
NIP. 197309051993031007